

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian yang ada di dalam bangsa Indonesia. Terbentuknya pancasila menjadi sebuah dasar negara berangkat dari pengalaman hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Pancasila bisa menyentuh segala dimensi kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila yang termuat di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaspisahkan satu dari yang lainnya. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menggambarkan roh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan penghormatan dan penghargaan terhadap sesama. Menghormati dan menghargai sesama menjadi pintu masuk manusia untuk bertindak secara adil dan beradab. Sila pertama sampai pada sila keempat Pancasila bermuara pada sila kelima.

Sila kelima menyiratkan keadilan sebagai pemberi kebebasan bagi manusia tanpa ada kelas-kelas sosial. Kebebasan bagi manusia dapat terjadi jika setiap individu bertindak secara adil. Tindakan adil berarti memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya dan begitu pun sebaliknya memberikan kepada dirinya apa yang menjadi haknya pula. Hak mempunyai sisi wajib karena itu adil berlaku serasi dalam hubungan yang saling mendukung satu sama lain antar hak dan kewajiban. Manusia harus secara utuh melaksanakan tindakan adil terutama dalam mewujudkan hak dan kewajiban. Bertindak secara seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban tentu harus harus direalisasikan secara baik kepada sesama.

Berkaitan dengan tindakan keadilan tersebut sila kelima Pancasila mengandung dua prinsip untuk memaknai upacara *tiwo iko* masyarakat Jawapogo. *Pertama*, keadilan harus melingkupi seluruh masyarakat Indonesia dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal itu berarti bahwa keadilan sosial tidak hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja ataukah orang-orang tertentu saja melainkan oleh seluruh masyarakat yang ada. Upacara *tiwo iko* diadakan di dalam masyarakat Jawapogo memiliki tujuan untuk bersama-sama menghormati pendapat dan kemampuan manusia lain. Hal tersebut sangat

mencerminkan keadilan sosial dalam sila kelima tetapi yang terjadi ada orang-orang tertentu mengabaikan hal tersebut. Keadilan di dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa keadilan bukan milik orang-orang tertentu saja tetapi milik seluruh masyarakat.

*Kedua*, keadilan mengacu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bisa saja menjadi pelaku untuk melakukan tindakan keadilan atau juga bisa menjadi sasaran dari tindakan adil. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan bisa menuntut segala hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Namun, masyarakat tidak hanya menuntut hak-haknya saja tetapi juga menjalankan kewajibannya untuk bertindak secara adil terutama terhadap mereka yang lemah agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Upacara adat *tiwo iko* pada dasarnya mengutamakan hak dan kewajiban dari setiap anggota masyarakat Jawapogo. Di dalam upacara tersebut setiap individu berhak menuntut haknya tetapi juga melaksanakan kewajibannya. Secara faktual, sering kali orang-orang tertentu mengabaikan hak dan kewajiban tersebut. Keadilan sosial sangat menekankan hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Oleh karena itu penegakkan keadilan dalam mengutamakan hak dan kewajiban tentu harus terealisasikan juga di dalam upacara tersebut.

Keadilan sosial tidak hanya bertindak adil dalam mendistribusi kekayaan-kekayaan yang ada, tetapi keadilan juga dilakukan dalam menciptakan keadaan yang aman bagi semua orang. Hal itu berarti bahwa keadilan baik secara materiil dan spiritual berjalan secara bersama-sama demi pembebasan bagi manusia secara keseluruhan. Keadilan dalam sila kelima secara jelas menjadi inspirasi bagi masyarakat Jawapogo dalam upaya menegakkan keadilan secara menyeluruh bagi masyarakat Jawapogo. Dalam mewujudkan hal tersebut ada tiga hal yang menjadi titik acuan bagi masyarakat Jawapogo antaranya sebagai berikut :

*Pertama*, keadilan dapat terjadi jika memiliki jaminan terhadap perlindungan kebebasan dan pembebasan manusia. Hal itu berarti bahwa seluruh dimensi hidup masyarakat Jawapogo harus dijiwai oleh sikap para anggota dalam hal hak dan kewajiban setiap orang. Hak dan kewajiban dapat memungkinkan terjadinya perlindungan terhadap kebebasan dan pembebasan manusia. Oleh

karena itu, tindakan adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap individu membantu semua orang untuk lebih mengekspresikan dirinya.

*Kedua*, tindakan adil bukan hanya sekedar mengungkapkan bahwa ada di dalam masyarakat, tetapi cara kerja sistem dalam sosial itu harus adil bagi semua pihak. Hal itu berarti bahwa tindakan adil yang harus diwujudkan adalah memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi semua orang. Terutama dalam konteks upacara adat *tiwo iko* masyarakat Jawapogo dituntut untuk bertindak adil dalam melindungi hak setiap individu dan memberikan kesempatan yang sama. Sistem sosial yang ada dalam masyarakat Jawapogo bukan hadir sebagai penghalang terselenggaranya keadilan yang sama bagi semua orang, tetapi sistem tersebut menciptakan keadilan yang sama bagi semua orang diberbagai aspek kehidupan.

*Ketiga*, keadilan menuntut adanya tanggung jawab dari orang-orang yang dipercayai sebagai pemimpin. Seorang pemimpin bertanggung jawab penuh untuk menentukan masa depan dan tanggung jawab solidaritas dari seluruh anggota masyarakat. Hal itu berarti bahwa keadilan harus diupayakan oleh seorang pemimpin di dalam upacara adat *tiwo iko*. Upaya tersebut adalah menjaga keseimbangan dan mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat Jawapogo. Selain itu, para pemimpin juga mesti meningkatkan kemakmuran sosial anggota masyarakatnya dan menjamin adanya kesejahteraan dalam mencapai hidup yang lebih layak. Keadilan yang diupayakan mampu membebaskan seluruh masyarakat Jawapogo dari penderitaan yang dirasakan. Sedangkan anggota masyarakat dalam tindakan solidaritasnya mesti mendukung perbedaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Perbedaan pendapat ataupun perbedaan kemampuan tersebut bukan menjadi hambatan dalam memperjuangkan keadilan. Sikap mempersatukan dan menerima segala perbedaan yang ada juga merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan keadilan di dalam upacara *tiwo iko*.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Pemerintah**

Pemerintah memiliki tugas penting untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman. Keamanan tersebut menjamin adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi secara baik. Hal itu berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan yang ada difasilitasi secara bertanggung jawab oleh pemerintah. Kebutuhan dapat terpenuhi secara baik dan bertanggung jawab jika ada tindakan adil yang diperjuangkan dan dipertahankan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Lembaga Sosial Masyarakat harus mengontrol secara serius akan pelaksanaan atau menjalankan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberian, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak yang ada di dalam diri masing-masing individu. Selain itu juga, LSM harus menjadi juru bicara bagi masyarakat yang aktif, kritis, dan tetap berada pada komitmen dalam memperjuangkan keadilan terutama menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi anggota masyarakat yang lemah atau menjadi korban ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan. Pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan tersebut harus diperhatikan secara baik agar terjamin adanya kebebasan dan pembebasan.

### **5.2.2 Bagi Para Pemimpin Adat**

Pemimpin adat bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Tanggung jawab ini tentunya memperjuangkan berjalannya tata aturan yang ada dan kesejahteraan anggota masyarakatnya. Tanggung jawab tersebut juga berupa kebijakan yang diputuskan dalam menyatukan cita-cita bersama dan kepentingan anggota masyarakatnya. Cita-cita dan kepentingan tersebut dicapai berdasarkan kebutuhan yang dialami oleh anggota masyarakat. Hal itu berarti bahwa dalam keputusan yang diambil tidak serta merta secara otoriter menentukan kebijakan tanpa adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dapat terjadi secara baik jika para pemimpin adat membuka kesempatan yang sama kepada semua orang secara adil untuk memberikan pendapat masing-masing.

Dalam kepemimpinan para pemimpin adat yang terjadi dalam upacara *tiwo iko* tentu harus berupaya mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota masyarakat Jawapogo. Keadilan tidak serta merta hanya sebuah pemahaman yang dikuasai oleh masing-masing pemimpin. Namun, pemahaman tersebut harus direalisasikan dalam kehidupan nyata terutama dalam memimpin upacara *tiwo iko* tersebut.

Para pemimpin adat juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan masa depan anggota masyarakat Jawapogo. Hal ini bermula dari keputusan-keputusan yang diambil dalam upacara *tiwo iko*. Para pemimpin adat harus secara adil memberikan kesempatan yang sama dan penghargaan terhadap kemampuan masing-masing anggota masyarakat. Melalui tindakan para pemimpin adat yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dan mengayomi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut akan berdampak positif bagi seluruh anggota masyarakat Jawapogo. Dampak tersebut terlihat dalam tindakan masyarakat Jawapogo untuk menghidupi keadilan sosial di dalam kehidupan nyata sehari-hari.

### **5.2.3 Bagi Masyarakat Jawapogo**

Masyarakat Jawapogo terdiri atas individu-individu yang membentuk sebuah komunitas sosial. Pada komunitas sosial tersebut setiap individu berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam kepentingan yang ingin dicapai. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa saja berupa kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Adanya upacara *tiwo iko* berbagai macam kepentingan tersebut disalurkan melalui pendapat masing-masing individu agar bisa menghasilkan kesepakatan dan kepentingan bersama. Hal itu berarti bahwa upacara *tiwo iko* diadakan sebagai media untuk menyatukan perbedaan yang ada. Kesepakatan bersama atau kepentingan bersama dapat dihasilkan jika secara adil memberikan kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat di dalam upacara tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat Jawapogo harus bertindak secara adil dalam menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di dalam diri masing-masing

individu. Dalam tindakan penghargaan dan penghormatan tersebut tentu harus ada pengendalian diri dalam diri masyarakat Jawabogo. Pengendalian diri tersebut sebagai bentuk pencegahan ketidakadilan di dalam masyarakat khususnya di dalam upacara tersebut. Masyarakat yang hadir di dalam upacara tersebut bukan untuk mereduksi nilai-nilai keadilan yang termuat di dalamnya. Masyarakat Jawabogo harus berupaya bahwa hak dan kewajiban berjalan serentak. Hal tersebut akan membuat keadilan yang ada di dalam sila kelima dapat diwujudkan di dalam kehidupan masyarakat Jawabogo.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. DOKUMEN, ENSIKLOPEDI, DAN KAMUS

- BP7. *Bahan Penataran P4, UUD 1945, GBHN*. Jakarta: BP7 Pusat, 1990.
- Data Profil Desa Jawapogo per 2021, pada Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Heuken, Adolf. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jilid II. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984.
- Panitia Lima. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1978.
- Prent, K. dkk (ed.). *Kamus Latin-Indonsia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Tim Penyusun. *Leksikon Islam*. Jakarta: Pustazet Perkasa, 1998.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

### II. BUKU-BUKU

- Affandi, Hernadi. *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2020.
- Alam, Wawan Tunggul. *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Bolo, Andreas D., Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylevester Kanisius Laku. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Chardas,Ujang. *Pendidikan Pancasila Untuk Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Darji. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: Penerbit Aries Lima, 1982.

- Dipoyudo, Kirdi. *Membangun Atas Dasar Pancasila*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990.
- Djamal, D.. *Pokok-Pokok Bahasan Pancasila*. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV Bandung, 1984.
- Hadad, Ismid (ed.). *Kebudayaan Politik dan Pembangunan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1979.
- Hadirman, F. Budi. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.
- Huljbers, Theo. *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995..
- Jebadu, Alex. *Bukan Berhala: Penghormatan kepada Leluhur*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Kaelen. *Filsafat Pancasila Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2002.
- .. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010.
- Karim, Mulyawam (ed.). *Merajut Nusantara Rindu Pancasila*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Krissantono (ed.). *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1976.
- Latif, Yudi. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2015.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Mardiatmadja, B.S.. *Menggapai Keadilan Sosial*. Yogyakarta:., Kanisius, 1991.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Setiawati, Eti. *Piranti Pemahaman Komunikasi dalam Wacana Interaksional : Kajian Pragmatis*. Malang: UB Press, 2018.
- Sunoto, H. *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Etika Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1981.

### **III. JURNAL, ARTIKEL, DAN MANUSKRIP**

Artawan, Cok Alik. "Interprestasi Visual Sila Kedua dan Kelima Wayang Beber Pancasila". *Jurnal Mudra*, 36:2, Mei 2021.

Cahyono, Hadi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima dalam Pembelajaran". *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7: 2, Desember 2020.

Febriansyah, Ferry Irawan."Keadilan Berdasarkan Pancasila Sesuai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa". *Jurnal Ilmu Hukum*, 13: 25, Februari 2017.

Rahma, Arlanda Nissa dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dalam Kehidupan Sehari hari". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18:1, Januari-Juni 2021.

Saparina, Amalya Salsa dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Praktik Kebebasan Berpendapat di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18:1, Januari-Juni 2021.

Subagyo. "Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya". *Jurnal Sejarah*, 1:1, Juni 2012.

### **IV. SKRIPSI DAN TESIS**

Roga Atanasius Hardinus. "Ritus *Ngoa Ngi'i* atau *Zaba Ngi'i* Kebudayaan Keo dalam Perbandingan dengan Sakramen Krisma dalam Gereja Katolik dan Relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja". Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2018.

Watu, Konradus. "Menilik Martabat Perempuan dalam Adat Belis Masyarakat Gyuwolo-Kotapau dan Pandangan Gereja dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2015.

### **V. WAWANCARA**

Ceme, Yohanes. Wawancara di Desa Jawapogo, 27 Desember 2021.

Gera, Fabianus. Wawancara di Desa Jawapogo, 9 Oktober 2021.

Lagho, Mathias. Wawancara di Desa Jawapogo, 10 Januari 2022.

Laki, Siprianus. Wawancara di Desa Jawabogo, 11 Oktober 2021.

Mere, Petrus. Wawancara di Desa Jawabogo, 9 Oktober 2021.

Sonda, Paskalis. Wawancara di Desa Jawabogo, 9 Oktober 2021.

## **VI. INTERNET**

Engo, Cyrilus Bau. "Peo", dalam *Blogspot*,

<http://cylbauengo.blogspot.com/2016/12/peo.html?m=1>, diakses pada 7 April 2021.

Pabubung, M. R. "Levi Straus: Strukturalisme dan Kekerabatan", dalam *wordpress*, <https://filsafatteoleogikatolik.wordpress.com/2020/04/25/levi-strauss-strukturalisme-dan-kekerabatan/>, diakses pada 25 Januari 2022.

Rahmah, Afifa. "Apa Saja Fungsi Sosialisasi? Ini Pengertian dan Tujuannya", dalam *Detik Pedia*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6053721/apa-saja-fungsi-sosialisasi-ini-pengertian-dan-tujuannya>, diakses pada 27 September 2022.

Sasrawan, Hedi. "Pengertian Sosialisasi Represif dan Partisipatif", dalam *Blogspot*, <https://hedisasrawan.blogspot.com/2014/08/pengertian-sosialisasi-represif-dan.html?m=1>, diakses pada 24 Agustus 2022.

## LAMPIRAN

### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah desa Jawabogo?
2. Apa arti dari upacara *tiwo iko* masyarakat Jawabogo?
3. Bagaimana sejarah adanya upacara *tiwo iko*?
4. Apa tujuan dibuat upacara *tiwo iko*?
5. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam upacara *tiwo iko*?
6. Upacara *tiwo iko* dibagi menjadi 3 yakni *tiwo iko kema sa'o*, *tiwo iko pasa tu'a laki ana*, dan *tiwo iko to'o ine waga ame*. Apa itu *tiwo iko kema sa'o*? Apa itu *tiwo iko pasa tu'a laki ana*? Dan apa itu *tiwo iko to'o ine waga ame*?
7. Bagaimana tahap-tahap dalam melakukan upacara *tiwo iko kema sa'o*, *tiwo iko*, *tiwo iko pasa tu'a laki ana*, dan *tiwo iko to'o ine waga ame*?
8. Siapa saja yang dilibatkan dalam tahap-tahap upacara *tiwo iko kema sa'o tiwo iko pasa tu'a laki ana*, dan *tiwo iko to'o ine waga ame*?
9. Siapa yang memimpin *pondo co'o* dan *pondo mere* dalam *tiwo iko kema sa'o*, *tiwo iko pasa tu'a laki ana*, dan *tiwo iko to'o ine waga ame*?
10. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum diadakan *pondo co'o* dan *pondo mere* dalam *tiwo iko kema sa'o*, *tiwo iko pasa tu'a laki ana*, dan *tiwo iko to'o ine waga ame*?
11. Apa syarat-syarat untuk mengadakan *tiwo iko kema sa'o*, *tiwo iko pasa tu'a laki ana*, dan *tiwo iko to'o ine waga ame*?
12. Apa itu *peo yenda*?
13. Apa arti dari batu penopang *peo*?
14. Apa arti dari *saka pu'u* dan *saka lobo*?
15. Bagaimana proses pembuatan *peo*?
16. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Jawabogo?
17. Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Jawabogo?
18. Bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Jawabogo?

19. Bahasa apa yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawabogo?
20. Kesenian apa saja yang ada di dalam masyarakat Jawabogo?